

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana dijadikan sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dan korban. Kerugian dan korban tersebut dapat berupa materi maupun nyawa manusia. Bencana kerap terjadi tanpa diduga sebelumnya tanpa sepengetahuan masyarakat, termasuk di Indonesia yang memiliki intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi. Terutama untuk kategori bencana alam yang seringkali tidak dapat diduga awal waktu terjadinya. Namun demikian, Indonesia bukan menjadi negara satu-satunya di dunia yang rawan bencana. Terdapat beberapa Negara di kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin yang juga sering mengalami bencana. Perbedaannya hanya terletak pada jenis bencana dan kerugian yang dideritanya.

Sebagai contoh Negara Jepang yang dikenal sebagai Negara yang kerap kali mengalami gempa. Hal ini dikarenakan Jepang terletak di kawasan *ring of fire* Pasifik yang membentuk cekungan mengelilingi Samudera Pasifik (Anneahira dalam Siswanto, 2014). Oleh karena posisi geografis tersebut, Jepang termasuk wilayah yang rawan gempa. Lingkar api Pasifik membentuk cekungan yang mengelilingi Samudera Pasifik yang kerap kali mengalami pergeseran lempengan bumi. Pergeseran lempeng bumi tersebut yang mengakibatkan terjadinya gempa. Sebagai contoh gempa yang terjadi pada Maret 2011, saat itu, Jepang mengalami gempa besar sekaligus menyebabkan

tsunami (www.detik.com dalam Siswanto, 2014). Total korban mencapai 13.000 jiwa meninggal.

Negara lain yang juga memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi ialah Turki, Honduras, India, Pakistan dan Thailand. Untuk mengetahui perbandingan berbagai jenis bencana dari negara-negara tersebut yang terjadi dalam kurun waktu terdekat ini (mendekati 2006) dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Perbandingan Bencana-Bencana Internasional

Negara	Bencana	Waktu	Korban Tewas	Kerusakan & Kerugian (juta US\$)
Turki	Gempa Bumi	17 Agustus 1999	17.127	8.500
Indonesia (Aceh)	Tsunami	26 Desember 2004	165.708	4.450
Honduras	Topan Mitch	8 November 1998	14.600	3.800
Indonesia (DIY)	Gempa Bumi	27 Mei 2006	5.716	3.134
India (Gujarat)	Gempa Bumi	26 Januari 2001	20.005	2.600
Pakistan	Gempa Bumi	8 Oktober 2005	73.338	2.851
Thailand	Tsunami	26 Desember 2004	8.345	2.198
Sri Langka	Tsunami	26 Desember 2004	35.399	1.454
India	Tsunami	26 Desember 2004	16.389	1.224

Sumber : *Asia Disaster Preparedness Center, Thailand; ECLAC, EM-DAT, Bank Dunia* dalam BAPPENAS (2006)

Pada Tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan mengenai bencana-bencana yang melanda beberapa negara dengan jumlah korban dan kerugian yang sangat besar. Seperti bencana gempa bumi yang melanda Turki pada tanggal 17 Agustus 1999. Gempa bumi ini menelan jumlah korban tewas sebanyak 17.127 jiwa dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar 8.500 (juta US\$). Selanjutnya bencana yang melanda Indonesia yaitu Tsunami di bagian utara Indonesia (Aceh) dan gempa bumi di bagian selatan Pulau Jawa (DIY dan

Jawa Tengah) pada tanggal 26 Desember 2004 dan 27 Mei 2006 masing-masing menelan jumlah korban tewas sebanyak 165.708 jiwa dan 5.716 jiwa dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar 4.450 (juta US\$) dan 3.134 (juta US\$).

Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal tersebut menyebabkan di Indonesia terdapat banyak gunungapi aktif (Kusumadinata, 1979; Katili dan Siswamidjojo, 1994; Voight *et al.*, 1998; Kelfoun *et al.*, 2000; Younga *et al.*, 2000; Prihadi, 2005). Katili dan Siswamidjojo (1994) menyatakan gunungapi (vulkan) adalah bentuk di muka bumi, berupa kerucut raksasa, kubah, atau bukit akibat penerobosan magma ke permukaan bumi. Gunungapi terjadi karena proses tumbukan menunjam yang aktif (Sudrajat, 1995).

Pada kebanyakan daerah rawan gempa, banyak masyarakat yang masih rela memiliki tempat tinggal di daerah yang justru rawan gempa. Hal ini mungkin dikarenakan harga beli tanah dan properti yang rendah walaupun penuh resiko ketika bencana gempa kecil dan besar melanda. Namun seberapa besar mereka mampu bertahan, bergantung pada keseharian apa yang dilakukan masyarakat saat memilih bertempat tinggal di atas lahan pemukiman rawan gempa. Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses yang berlangsung secara perlahan. Beberapa jenis bencana seperti gempa, hampir tidak mungkin diperkirakan secara akurat kapan dan dimana akan terjadi dan besaran ukurannya. Meskipun demikian kejadian

bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian dan jiwa maupun materi. Kekuatan tersebut terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya.

Tepat pada tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi mengguncang dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa berpusat di Samudera Hindia pada jarak sekitar 33 KM di selatan Kabupaten Bantul, gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan berlangsung selama 52 detik. Karena gempa berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 KM di bawah tanah, guncangan di permukaan lebih dahsyat daripada gempa yang terjadi pada lapisan yang lebih dalam dengan kekuatan gempa yang sama, maka terjadi kehancuran besar, khususnya di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah (BAPPENAS, 2006).

Ada tiga faktor utama alasan penelitian ini dilakukan di Bantul, yakni pertama, meskipun itu gempa hanya sebesar 5,9 SR dan pada kedalaman 33 KM dibawah tanah, telah membuat peristiwa pada Mei 2006 adalah salah satu gempa yang terburuk pada abad ke-21. Berikut jumlah kerusakan rumah di DIY akibat gempa bumi 2006 dijelaskan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

Kerusakan rumah di DIY akibat gempa Bantul 2006

Kabupaten/ Kodya	Rusak Total	Rusak berat/sedang	Rusak ringan
Bantul	71.763	71.372	73.669
Sleman	19.113	-	76.752
Kulonprogo	4.623	8.196	9.041
Gunungkidul	7.454	11.033	27.218

Kabupaten/ Kodya	Rusak Total	Rusak berat/sedang	Rusak ringan
Kota Yogyakarta	6.095	8.408	15.364

Sumber : Kompas dalam Raharjo, 2006

Dilihat pada Tabel 1.2 di atas menerangkan bahwa kerusakan rumah yang terjadi saat gempa 2006 ialah yang paling parah melanda Kabupaten/ Kodya Bantul dengan jumlah rumah rusak ringan sebanyak 73.669 rumah, sedangkan rumah yang mengalami kerusakan berat/sedang sebanyak 71.372 rumah. Selain itu terjadi kerusakan rumah secara total sebanyak 71.763 rumah. Sedangkan wilayah yang paling rendah mengalami kerusakan rumah ialah Kabupaten/ Kodya Kulonprogo dengan masing-masing jumlah kerusakan rumah ringan, berat/sedang, dan total sebanyak 9.041, 8.196 dan 4.623 rumah. Selanjutnya dijelaskan jumlah korban meninggal pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah korban meninggal

Kabupaten/ Kodya	Korban meninggal
Bantul	4.143
Sleman	243
Kulonprogo	22
Gunugkidul	84
Kota Yogyakarta	218
Jumlah	4.710

Sumber : Kompas dalam Raharjo, 2006

Pada Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah korban meninggal terbanyak ialah di Kabupaten/ Kodya Bantul sebanyak 4.143 korban jiwa. Sedangkan untuk jumlah korban meninggal terendah ialah di Kabupaten/

Kodya Kulonprogo dengan jumlah 22 korban jiwa. Selanjutnya pada Tabel 1.4 dijelaskan jumlah kerusakan rumah di Kabupaten Bantul akibat gempa bumi 2006, sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kerusakan rumah tinggal di Kabupaten Bantul akibat gempa 2006

Kecamatan	Rusak total	Rusak berat/ sedang	Rusak ringan
Kasih	1.790	4.657	11.946
Sewon ²	8.281	8.496	6.004
Banguntapan	5.557	8.232	7.452
Sedayu	243	1.800	4.591
Pajangan	1.228	2.216	2.610
Bantul	4.708	7.338	3.301
Pandak	2.966	5.760	4.069
Piyungan	5.514	4.801	3.185
Bambanglipura	6.587	2.732	816
Pleret ³	8.139	2.322	1.438
Jetis ¹	11.356	2.610	664
Srandakan	342	3.054	3.506
Imogiri	5.664	5.354	11.781
Dlingo	1.377	3.380	4.720
Sanden	97	2.052	4.650
Kretek	1.121	4.665	2.486
Pundong	6.793	1.903	500
Total	71.763	71.372	73.669

Sumber : Kompas dalam Raharjo, 2006

Dilihat pada Tabel 1.4 di atas menerangkan bahwa kerusakan rumah tinggal di Kabupaten Bantul akibat gempa 2006. Terdapat tiga Kecamatan yang mengalami kerusakan rumah tinggal (rusak total) paling parah ialah Kecamatan Jetis, Sewon dan Pleret, dengan masing-masing kerusakan rumah sebanyak 11.356, 8.281 dan 8.139. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan yang mengalami kerusakan rumah tinggal terparah ialah di

Kecamatan Jetis. Hal ini yang menjadi alasan dilakukannya penelitian pada Kecamatan Jetis.

Kedua, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantul rentan terhadap gempa Risiko (bagian dari cincin dari jalur api). Sementara tremor dan dua yang kuat gempa susulan yang paling dekat dengan kota Yogyakarta, kerusakan terburuk adalah di daerah Bantul. Ketiga, gempa bumi adalah jenis bencana yang bisa diulang dan relatif sulit untuk memprediksi tepatnya kapan dan di mana akan itu melanda. Sehingga oleh karena itu salah satu bentuk mitigasi yang paling tepat untuk mengatasi sebelum terjadinya kerusakan yang diakibatkan karena gempa ialah dengan partisipasi dan kesediaan masyarakat untuk membayar (*willingness to pay*) premi asuransi bencana alam, khususnya gempa yang dapat kapan saja terjadi dan melanda wilayah Jetis, Bantul, DIY. Dengan adanya asuransi ini, maka keberadaan rasa aman masyarakat untuk dapat beraktivitas seperti biasa akan semakin terjamin, karena sudah terlindungi jika terjadi suatu hal yang di luar batas wajar.

Semakin meningkatnya ancaman bencana mendorong Pemerintah Indonesia di tahun 2007 menetapkan peraturan yang bertujuan untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) diharapkan mampu meningkatkan upaya untuk penanggulangan bencana dengan terencana, terkoordinasi dan terpadu. Upaya ini merupakan gerakan bersama yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi setiap elemen bangsa agar terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana. Pentingnya UU PB tersebut didasarkan pada fakta

bahwa Indonesia terletak diantara dua Benua dan Samudera, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang merupakan wilayah *volcanic arc* (sabuk vulkanik) dan merupakan empat lempeng tektonik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keempat lempeng tersebut akan terus mengalami pergeseran dan pergerakan yang berpotensi menciptakan gempa. Resiko bencana akan terus dihadapi oleh Indonesia dalam kondisi ini.

Kehadiran UU Penanggulangan Bencana dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pendekatan untuk melakukan mitigasi dan siaga bencana yang lebih baik lagi. Berdasarkan Pasal 47 yang berbunyi bahwa Pemerintah dapat melakukan upaya mitigasi bencana melalui ; 1). Pencegahan (*prevention*), penjinakan (*mitigation*), dan kesiapsiagaan (*preparedness*); 2). Selama bencana : tahap awal, tahap darurat (*response*), konsolidasi (*consolidation*), dan tahap akhir, rehabilitasi (*rehabilitation*); dan 3). Sesudah bencana: rekonstruksi, dan pembangunan (*development*). Dari ketiga fase tersebut maka sangat penting dibutuhkan upaya yang nyata dari semua elemen. Terutama mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Dengan hal ini telah tersedianya payung hukum untuk mitigasi dan adaptasi bencana.

Menurut Hidayati Denny, dkk (2006), terdapat fakta lain yang menunjukkan bahwa minimnya wawasan masyarakat untuk memulai gerakan siaga bencana yang lebih terencana menjadi penyebab utama tingginya korban. Sekalipun terjadinya bencana merupakan fenomena yang memiliki

sejarah panjang di Indonesia. Minimnya mitigasi dan adaptasi bencana diakibatkan dari suatu lembaga pada kondisi bencana yang setiap saat terjadi. Oleh karena hal itu perlu dilakukannya mitigasi yang menurut UU Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat 9 mendefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berkurangnya risiko bencana yang terjadi tersebut merupakan kondisi yang perlu diciptakan melalui serangkaian kegiatan yang bersifat preventif dengan cara menciptakan kesadaran manakala terjadi bencana.

Bencana yang terjadi seringkali menyebabkan hilang dan rusaknya aset penghidupan milik masyarakat yang menjadi korban. Maka dari itu diperlukannya proses perbaikan kembali pasca terjadi bencana yang melanda dengan mekanisme penyesuaian jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat belajar dari peristiwa-peristiwa bencana yang dialami selama kehidupannya. Sebagian individu bahkan telah melakukan perlindungan diri atas diri dan asset melalui keikursertaan mereka dalam program asuransi. Bentuk perlindungan ini sangat diperlukan agar setidaknya dalam jangka pendek setiap individu dapat tetap menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti sandang pangan dan papan serta kebutuhan penting lainnya.

Dalam UU Penanggulangan Bencana telah mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Dari segi hak masyarakat, bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian akibat bencana yang

disebabkan oleh kegagalan konstruksi (Pasal 26 ayat 3). Menurut Sunarsip dalam Siswanto (2009), walaupun UU Penanggulangan Bencana tidak secara eksplisit mengatur keterlibatan asuransi dalam dalam penganggulangan bencana namun terdapat potensi public, yaotu masyarakat atau rumah tangga yang dapat memiliki kesempatan melakukan mitigasi berdasarkan kemampuannya. Masyarakat dapat melindungi diri dan asetnya dengan ikut serta dalam program asuransi kerugian.

Saat ini telah berkembang beberapa skema ganti kerugian, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh lembaga yang secara khusus memberikan perlindungan yang lebih dikenal dengan nama asuransi. Melalui asuransi maka kewajiban untuk melakukan ganti kerugian akibat bencana tidak lagi menjadi semata-mata beban pemerintah ataupun individu yang bersangkutan. Ganti kerugian tersebut dapat dialihkan kepada lembaga atau perusahaan asuransi tersebut manakala setiap warga masyarakat di daerah rawan bencana menjadi peserta asuransi.

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas mengenai data kerusakan rumah tinggal di Kabupaten Bantul akibat gempa 2006, maka perlu dilakukannya suatu penelitian seberapa besar kesediaan membayar masyarakat terkait premi asuransi mitigasi bencana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai penelitian itu adalah dengan mengukur besarnya *willingness to pay* (*WTP*) terkait premi asuransi bencana alam. Upaya mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ini dapat dilakukan dengan metode analisis

kesediaan membayar (*willingness to pay*) masyarakat terhadap premi asuransi dengan metodologi *Contingent Valuation Method (CVM)*.

Yakin (1997) mendefinisikan *willingness to pay* adalah keinginan untuk membayar sebagai jumlah uang yang ingin diberikan seseorang untuk memperoleh suatu peningkatan kondisi lingkungan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Metodologi *Contingent Valuation Method (CVM)* adalah teknik untuk mengestimasi penilaian masyarakat terhadap perbaikan barang publik (Mitchell and Carson, 1989).

Wibowo (2014) telah meneliti pengaruh jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, pendapatan, capaian pendidikan, lama bertempat tinggal, status kependudukan, pertanyaan tentang latar belakang sosial ekonomi, penilaian responden terhadap premi asuransi gempa mikro di Bandung dan sekitarnya. Hasil yang diperoleh bahwa jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, pendapatan, lama pendidikan, dan lama bertempat tinggal (lebih dari 10 tahun) berpengaruh terhadap *willingness to pay* premi asuransi gempa mikro di Bandung. Sedangkan status kependudukan masyarakat yang asli Bandung atau bukan (masa tinggal sama atau kurang dari 10 tahun) tidak berpengaruh terhadap *willingness to pay* premi asuransi gempa mikro di Bandung.

Wang (2009) telah meneliti pengaruh *risk awareness* (kesadaran akan risiko) terhadap *willingness to buy natural disaster insurance in China*. Hasilnya adalah bahwa kesadaran masyarakat akan risiko berpengaruh

terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di China. Namun masyarakat baru hanya merasakan ancaman bahaya setelah mengalami dampak yang parah yang berarti menunjukkan bahwa prosentase yang lebih rendah dari penerimaan asuransi bencana.

Kawawaki (2012) telah meneliti pengaruh *risk averse* (menghindari risiko) terhadap *Evidence from a survey of Residents in Tokyo Metropolitan Area*. Hasilnya penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya untuk menghindari risiko bencana (*risk averse*) apabila disediakannya informasi yang tepat akan risiko benca (gempa). Warga akan bersedia membayar lebih untuk mengurangi risiko bencana. Sementara bias merasa aman, masyarakat bersedia membayar lebih sedikit dari sebelumnya.

Suryanto dan Wiarti (2012) telah meneliti pengaruh *perception* yaitu persepsi risiko masyarakat dan valuasi ekonomi terhadap mitigasi bencana di Bantul. Hasilnya adalah bahwa persepsi risiko masyarakat terhadap bencana ialah berpengaruh terhadap kesediaan membayar dalam rangka untuk mitigasi. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh variabel sosial ekonomi dalam penelitian tersebut dengan analisis regresi berganda. Tingkat persepsi risiko masyarakat terhadap bencana gempa di sekitar *Kali Opak* Kabupaten Bantul termasuk kategori tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul ketertarikan peneliti yang terfokus pada topik mengenai premi asuransi mitigasi bencana, sehingga dapat diketahui seberapa besar masyarakat untuk membayar premi asuransi untuk

mitigasi bencana. Asuransi sebagai salah satu bentuk mitigasi yang dapat menekan terjadinya reduksi kerugian. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mengetahui *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana, terutama masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Peneliti melakukan identifikasi dengan menentukan judul “Analisis *Willingness To Pay* premi asuransi mitigasi bencana (Studi Kasus Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul).

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada kesediaan membayar premi asuransi mitigasi bencana khususnya di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa nilai *willingness to pay* dan faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Namun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga dalam tanggungan terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
4. Untuk mengetahui pengaruh capaian pendidikan terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
6. Untuk mengetahui pengaruh lama bertempat tinggal terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
7. Untuk mengetahui pengaruh status kependudukan terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
8. Untuk mengetahui pengaruh *risk awareness* terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
9. Untuk mengetahui pengaruh *risk averse* terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
10. Untuk mengetahui pengaruh *perception* terhadap *willingness to pay* premi asuransi mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat mendukung penelitian-penelitian yang terkait dengan mitigasi bencana alam dengan metode *CVM* dan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana yang akan terjadi kapanpun.
2. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian yang dilakukan di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ini semoga dapat menjadi pertimbangan dan informasi bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana dan peningkatan jumlah kesediaan membayar premi asuransi masyarakat terhadap mitigasi bencana di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
3. Manfaat bagi penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memperoleh waktu dan kesempatan untuk memahami secara lebih dalam dan memperluas wawasan tentang seberapa kepedulian masyarakat terhadap mitigasi bencana dilihat dari kesediaan membayar premi asuransi mitigasi bencana di suatu daerah.